

BIRO KERJA SAMA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO KERJA SAMA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFOMASI PUBLIK (DIP) BIRO KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO KERJA SAMA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nornor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Kerja Sama Daerah, Daftar Informasi Publik (DIP) Biro Kerja Sama Daerah Tahun 2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO KERJA SAMA DAERAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BIRO KERJA SAMA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025.

PERTAMA

Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Daftar informasi publik pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dałam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta,

Marulina Dewi NIP 197702261997112001

Tembusan:

- 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor: 11 Tahun 2025

Tanggal: 2 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2025

0	7	თ	Cī	4	ω	2	_	(1)	N O
Data Kerja Sama Pihak Ketiga yang Tidak Memuat Klausul Kerahasiaan dan Tidak Melanggar UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 17	Jumlah Naskah Kerja Sama Pihak Ketiga	Data Sister City	SOP Biro Kerja Sama Daerah	Tugas dan Fungsi Bìro Kerja Sama Daerah	Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Daerah	Visi dan Misi Biro Kerja Sama Daerah	Profil singkat Biro Kerja Sama Daerah	(2)	Ringkasan Isi Informasi
Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga	Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	Kepala Bagian Perjalanan Dinas	Kepala Bagian Perjalanan Dinas	Kepala Bagian Perjalanan Dinas	Kepala Bagian Perjalanan Dinas	(3)	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi
PPID	PPID	PPID	PPID	PPID	PPID	PPID	PPID	(4)	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	(5)	Waktu pembuat informasi
Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	(6)	Bentuk informasi yang tersedia
Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	(7)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
Berkala	Berkala	Setiap Saat	Setiap Saat	Setiap Saat	Setiap Saat	Setiap Saat	Setiap Saat	(9)	Jenis *Berkala *Setiap Saat *Serta Merta

15	14	13	12	11	10	9	(1)	No.
PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Surat Keputusan Tentang Susunan Tim PPID	Jumlah Kolaborasi dengan Mitra Luar Negeri dan Dalam Negeri	Kegiatan Mitra Praja Utama	Data Kerja Sama Pemerintah. Daerah yang Tidak Memuat Klausul Kerahasiaan dan Tidak Melanggar UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 17	Jumlah Naskah Kerja Sama Pemerintah Daerah	(2)	Ringkasan Isi Informasi
DIGA	Qldd	PPID	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri	(3)	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi
PPID	PPID	PPID	PPID	PPID	PPID	PPID ,	(4)	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
2010	2008	2025	2025	2025	2025	2025	(5)	Waktu pembuat informasi
Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	Softcopy	(6)	Bentuk informasi yang tersedia
Selama berlaku	Selama berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	(7)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
Setiap Saat	Setiap Saat	Setiap Saat	Berkala	Berkala	Berkala	Berkala	(9)	Jenis *Berkala *Setiap Saat *Serta Merta

	1	_	
17	16	3	No.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 ahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	(2)	Ringkasan Isi Informasi
PPID	PPID	(3)	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi
PPID	PPID	(4)	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
2016	2017	(5)	Waktu pembuat informasi
Softcopy	Softcopy	(6)	Bentuk informasi yang tersedia
Selama berlaku	Selama berlaku	(7)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
Setiap Saat	Setiap Saat	(9)	Jenis *Berkala *Setiap Saat *Serta Merta

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta,

Marulina Dewi NIP 197702261997112001